



**RENCANA
KERJA
PERUBAHAN
BPKAD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja perubahan OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2024 penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "SINGLE CODEBASE".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta adalah rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yang disajikan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2024. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan .yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- 2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD menguraikan pokok bahasansistematika Renja Perubahan SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RPKD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat

Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.a. Evaluasi kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran yang ada.
3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja TW II Tahun 2024

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta samapi dengan TW II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan

tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan TW II Tahun 2024 terdapat pada Lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Perlunya peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Program yang telah disusun :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 134 (seratus tiga puluh empat) orang atau 46,53%.(empat puluh enam koma lima puluh tiga persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2024

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j. Penagihan Pajak Daerah
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

C. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 6 (tujuh) yaitu: **"Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih"** Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang

mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 terdapat pada Lampiran.

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perubahan

Usulan Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan Kota Yogyakarta dan mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka pemulihan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan . Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan upaya-upaya bersama dari semua pihak secara komprehensif dalam rangka meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	8.225.000,00	80,00%	4.950.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	8.225.000,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	43 Dokumen	6.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	43 Dokumen	6.600.000,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	43 Dokumen	3.025.440,00	100,00%	3.025.440,00	100,00%	3.025.000,00	100,00%	99,99%							
	6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	43 Dokumen	3.025.440,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	68.229.000,00	55,00%	36.191.000,00	55,00%	33.299.400,00	100,00%	92,01%							
	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	49.175.000,00	25,00%	600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6.561.616,00	100,00%	6.325.000,00	100,00%	4.130.000,00	100,00%	65,30%							
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						26.754.959.590,00		12.262.668.590,00		3.157.751.905,00		25,75%						
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	26.362.425.590,00	47,19%	12.081.144.590,00	47,19%	2.981.351.090,00	100,00%	24,68%							
	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	660.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	3	Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0 Dokumen	0 Dokumen	181 Dokumen	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	100,00%							
	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	153.660.000,00	33,19%	50.000.000,00	33,19%	49.839.000,00	100,00%	99,68%							
	5	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	25 Dokumen	47.896.000,00	49,98%	18.415.000,00	49,98%	18.290.000,00	100,00%	99,32%							
	6	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	51.775.000,00	98,62%	51.060.000,00	98,62%	50.662.815,00	100,00%	99,22%							
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan Koordinasi Perhitungan PFK	0 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	2.783.000,00	72,72%	2.024.000,00	72,72%	1.331.000,00	100,00%	65,76%							

2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	80,00%	33.086.000,00	80,00%	15.863.000,00	100,00%	47,94%												
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Wajib Pajak	0 Wajib Pajak	2.850 Wajib Pajak	0,00%	217.153.000,00	81,43%	88.575.000,00	105,02%	50,58%												
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 laporan	0 laporan	12 laporan	48,78%	60.179.000,00	48,78%	28.515.000,00	50,03%	41,68%												
5	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 laporan	0 laporan	12 laporan	0,00%	366.172.000,00	32,01%	7.711.000,00	15,21%	89,85%												
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Objek Pajak	0 Objek Pajak	60 Objek Pajak	58,30%	7.150.000,00	58,30%	3.179.000,00	134,31%	88,92%												
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0 dokumen	0 dokumen	112.000 dokumen	90,70%	5.049.000,00	90,70%	2.805.000,00	104,50%	78,18%												
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0 Layanan	40.255 Layanan	0,00%	387.180.000,00	48,19%	154.204.000,00	98,44%	97,73%												
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	30,00%	73.110.000,00	30,00%	3.993.000,00	100,00%	60,50%												
10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	0 Ketetapan	0 Ketetapan	50.500 Ketetapan	0,00%	323.945.000,00	65,85%	84.670.000,00	133,79%	59,08%												
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian Surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	0 Berkas	0 Berkas	1.000 Berkas	0,00%	111.805.000,00	43,39%	47.375.000,00	227,54%	95,08%												
12	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	0	0	0	0,00%	392.508.000,00	65,58%	45.620.000,00	142,88%	95,70%												
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	50,40%	23.936.000,00	50,40%	7.095.000,00	100,00%	60,00%												
Rata-rata capaian kinerja										115,12%	72,10%												
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang												
Total anggaran dari seluruh program						87.244.715.134,00	42.675.580.857,00	27.204.353.436,00															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)										97,31%	63,75%												
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)										Sangat Tinggi	Rendah												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sudah dilaksanakan sosialisasi penyusunan alokasi anggaran kepada PEP 2. Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan.																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Masih ditemukan OPD yang mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Identifikasi OPD yang tidak sesuai dalam pengalokasian anggaran dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Melakukan pendampingan OPD dalam penganggaran kegiatan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Pendampingan OPD dalam perencanaan dan penganggaran di awal tahun.																						
Yogyakarta,										2024		Yogyakarta,										2024	
Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
SULISTYAWATI, S.E., M.Si NIP. 196712161997032002										Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004													

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Keuangan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	43.893.450.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	53.512.864.502		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100% 92.49% 95.12%	176.073.176 16.502.167.449 268.904.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100% 92.49% 95.12%	158.811.174 21.525.907.292 253.209.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	95.12%	5.545.458.324	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	95.12%	10.259.216.450		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	447.281.800.000 100% 16,000,000,000	3.675.309.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	447.281.800.000 100% 16,000,000,000	3.643.170.000		
Jumlah Anggaran					70.061.362.449						Jumlah usulan	89.353.178.418

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					